Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized

59959

INDONESIA

2010 - 2011

Profil Sektor Pembangunan Manusia

Memperkuat Institusi Kesehatan dan Pendidikan di Indonesia

THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Daftar Isi	
Indonesia dan Pembangunan Manusia	1
Sekilas Pendidikan	2
Sekilas Kesehatan	3
Maternal and Neo-Natal Health Kesehatan Ibu dan Bayi	4
Asuransi Kesehatan	5
PendidikanAnak Usia Dini	6
Kesehatan dan Gizi Sekolah	8
Pendidikan Dasar	10
Reformasi Guru	14
Pendidikan Menengah dan Keterampilan	16
Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Inovasi	17
Pendidikan Profesional Kesehatan dan Medis	18
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	20
Detail Proyek	22
Fakta-fakta Penting Pendidikan	24
Fakta-fakta Penting Kesehatan	26
Jangkauan Geografis	28

Indonesia dan Pembangunan Manusia

Strategi Kemitraan Negara (CPS) Bank Dunia untuk 2009-2012 menandai kebangkitan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah yang percaya diri, dan negara yang menikmati posisi yang makin baik di tingkat regional dan global. Sepuluh tahun lalu, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Kini, Indonesia telah mengalami transformasi institusi yang luar biasa dan telah menjadi sistem demokrasi paling dinamis di wilayah Asia Tenggara. Pemerintah daerahnya menjadi pemain utama dalam penyediaan layanan.

Dalam lingkup sosial dan ekonomi, Indonesia juga semakin maju. Meski demikian, Indonesia harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki sektor pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, dan tata kelola pemerintah. Demi memenuhi berbagai tantangan ini, hambatan utama Indonesia bukanlah ketiadaan dana, namun diperlukannya institusi yang efektif dan akuntabel agar sumber daya yang tersedia dapat dijadikan hasil pembangunan yang lebih baik. Tahap transformasi berikutnya akan lebih menantang bagi Indonesia. Negara ini akan memasuki reformasi generasi kedua dan akan memerlukan layanan seperti infrastruktur yang lebih canggih, pendidikan menengah dan tinggi, serta sistem asuransi kesehatan yang berkelanjutan.

Buklet ini menggarisbawahi portofolio kegiatan Bank Dunia yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam sektor Pengembangan Manusia, yang melingkupi sektor kesehatan dan pendidikan. Sektor Pengembangan Manusia dari Bank Dunia melingkupi seluruh siklus kehidupan manusia – dari kesehatan ibu dan bayi (neonatal), asuransi kesehatan, pendidikan anak usia dini, kesehatan sekolah dan gizi, pendidikan dasar, hingga reformasi guru, pendidikan menengah dan keterampilan kaum muda, pendidikan tinggi, pendidikan profesi medis dan kesehatan serta belajar sepanjang hayat.

Sekilas Pendidikan

Sistem sekolah di Indonesia luas dan beragam. Dengan lebih dari 46 juta siswa dan 2,7 juta guru di lebih dari 250.000 sekolah, sistem pendidikan Indonesia adalah terbesar ketiga di Asia dan terbesar keempat di Dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat).

Dua kementerian bertanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan, 84% sekolah berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan 16% sisanya di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sekolah swasta memainkan peran penting. Hanya 7% sekolah dasar adalah sekolah swasta, sedangkan 56% sekolah menengah pertama dan 67% sekolah menengah atas adalah sekolah swasta. Sejak desentralisasi, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam penyediaan layanan pendidikan.

Indonesia meraih partisipasi menyeluruh untuk sekolah dasar dan hampir meraih partisipasi menyeluruh untuk sekolah menengah pertama. Tujuan Pembangunan Milenium, termasuk kesetaraan gender, sedang diperjuangkan. Sekarang, hampir setiap anak Indonesia menempuh pendidikan dasar dan sebagian besar yang mulai Kelas 1 menyelesaikan hingga Kelas 9. Meski mengukir prestasi di atas, pendidikan di Indonesia terus menghadapi tantangan. Contohnya, Indonesia menduduki peringkat 57 dari 65 pada ujian *Internasional Trends in Mathematics and Science Studies* tahun 2009. Hal ini terkait dengan berbagai isu yang rumit termasuk kualitas pengajaran dan sistem jaminan mutu yang lemah.

Pendidikan adalah penting bagi agenda pembangunan pemerintah Indonesia. Belanja pendidikan telah meningkat drastis setelah krisis ekonomi, dan sekarang mencapai 3,8% dari PDB dan 19,7% dari belanja pemerintah. Serangkaian reformasi telah berlangsung akhir-akhir ini, termasuk sertifikasi guru dan bantuan dana untuk sekolah agar dapat menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas.

Dukungan Bank Dunia

Dukungan Bank Dunia berdasarkan pada kemitraannya dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Kementerian Agama bertujuan untuk mendukung transformasi sektor pendidikan. Oleh karena itu, kerja sama ini mencakup seluruh spektrum pendidikan – dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi dan peningkatan kualifikasi akademis guru – melalui layanan pengetahuan *(knowledge services)* serta kegiatan yang dibiayai dana perwalian *(trust funds)* dan proyek investasi. Di masa mendatang, tantangan penting bagi Indonesia adalah terus memperbaiki kualitas pemberian layanan pendidikan dasar, dan meningkat pada perluasan akses ke pendidikan tinggi dan memperkuat kaitannya dengan pasar tenaga kerja.

Sekilas Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Indonesia telah membaik walaupun beberapa hal tetap menjadi masalah dan tantangan baru terus meningkat. Kemajuan yang dicapai termasuk penurunan angka kematian bayi dan meningkatnya umur harapan hidup, tetapi angka kematian ibu dan kekurangan gizi pada anak tetap menjadi masalah besar. Transisi demografis dan epidemiologis dipercepat dengan meningkatnya pendapatan dan populasi yang menua. Pergeseran ini berakibat pada peningkatan yang cepat dari tuntutan layanan kesehatan yang lebih banyak dan lebih baik. Sistem kesehatan Indonesia harus menjawab tuntutan tersebut dengan meningkatkan kualitas layanan dan menganeka-ragamkan pembiayaan kesehatan.

Pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia dengan berani menjanjikan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengurangan risiko melalui peningkatan program asuransi kesehatan. Pemerintah Indonesia segera menyediakan asuransi kesehatan untuk orang miskin, yang sekarang berjumlah sepertiga dari populasi. Sistem asuransi kesehatan baru ini memerlukan reformasi layanan jasa dan sistem fiskal antar-pemerintah. Guna mendapatkan pendanaan yang terus-menerus, reformasi cakupan layanan kesehatan penting untuk dilakukan secara menyeluruh. Agar dapat memberikan hasil yang lebih baik, sistem kesehatan masyarakat harus memperbaiki layanan preventif. Melalui pelaksanaan reformasi sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berdasarkan prioritas, Indonesia akan mampu memenuhi Tujuan Pembangunan Milenium, menambah akses terhadap layanan yang lebih berkualitas dan menyediakan jangkauan asuransi kesehatan menyeluruh yang pembiayaannya terus berkelanjutan.

Dukungan Bank Dunia

Bank Dunia membantu pemerintah memperkuat sistem kesehatan dengan fokus pada reformasi pembiayaan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan usaha untuk memperbaiki kesehatan ibu dan pencapaian HIV/AIDS.

Bank Dunia memberikan bantuan pengembangan regulasi pelaksanaan asuransi kesehatan, dukungan dana bagi program asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin, analisis aktuarial, ulasan pengeluaran, dan jajak kebutuhan dari sisi penawaran *(supply side)*. Dalam kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Bank Dunia melaksanakan program Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan (KPPK), yang bertujuan memperbaiki sistem jaminan kualitas dari pendidikan profesi kesehatan.

Bank Dunia juga menyediakan bantuan dana dan teknis untuk pengembangan agenda reformasi kesehatan dan terlibat dalam advokasi dialog kebijakan dan kesadaran akan HIV/AIDS, dengan perhatian khusus pada Papua. Proyek air dan sanitasi berbasis masyarakat dan menjalankan inisiatif pembangunan atas permintaan masyarakat menawarkan platform lokal yang memberikan kerangka bagi pendekatan multisektoral untuk memperbaiki layanan kesehatan masyarakat yang diberikan di seluruh Indonesia. Sebuah percontohan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan ibu dan bayi sedang berjalan di Jawa Barat.

Kesehatan Ibu dan Bayi

Lebih dari 73% kelahiran di Indonesia didampingi pertolongan persalinan tenaga kesehatan (linakes), dan hampir 40 persen perempuan di Indonesia melahirkan di fasilitas kesehatan, sehingga secara drastis mengurangi risiko kematian ibu melahirkan. Meski ada tren positif dalam hal meningkatnya penggunaan pertolongan persalinan tenaga kesehatan, akses menyeluruh ke beberapa tingkat layanan antenatal, dan melaksanakan keluarga berencana, ternyata belum cukup untuk mengurangi angka kematian ibu. Sebagian besar perempuan miskin tetap melahirkan di rumah tanpa pertolongan persalinan tenaga kesehatan; banyak ibu meninggal dunia ketika terjadi komplikasi saat melahirkan.

Usaha yang lebih besar diperlukan untuk mengatasi kematian ibu di Indonesia. Bank Dunia membantu pemerintah dengan analisis mendalam tentang kendala pada sistem kesehatan yang menyebabkan kematian ibu.

Proyek Percontohan Jasa Layanan Kesehatan Ibu

Untuk mengurangi kematian ibu dan bayi dalam proses melahirkan, Bank Dunia bekerja sama dengan Pusat Kelangsungan Hidup Anak *(Center for Child Survival)* di Universitas Indonesia dan Pusat Manajemen Layanan Kesehatan *(Center for Health Services Management)* di Universitas Gadjah Mada untuk merancang dan membuat percontohan sebuah model bagi reformasi menyeluruh dari sistem jasa layanan kesehatan ibu. Percontohan ini bertujuan untuk mengurangi kematian ibu dan bayi dalam proses melahirkan dengan cara memperbaiki akses perempuan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat dan memperbaiki kinerja jaringan rujukan demi manajemen kasus yang berkualitas dan tepat waktu. Proyek percontohan tersebut dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Bogor dan Cianjur.

Model ini terdiri dari enam bidang utama:

1. Mempromosikan untuk melahirkan di fasilitas melahirkan bersertifikat.
2. Menerapkan kebijakan untuk memastikan akses masyarakat miskin untuk melahirkan di dalam fasilitas kesehatan.
3. Menjalankan jaringan rujukan yang layak untuk fasilitas kelahiran anak dan rumah sakit rujukan umum dan swasta.
4. Menerapkan kebijakan untuk memastikan layanan berkualitas yang layak di rumah sakit, terutama bagi manajemen kelahiran normal, pencegahan dan manajemen pendarahan setelah melahirkan *(post-partum hemorrage)* dan manajemen bedah sesar.
5. Merancang dan melaksanakan strategi promosi untuk meningkatkan tuntutan melahirkan dalam fasilitas kesehatan, termasuk menjelajahi kerjasama dukun bayi dengan bidan dan menyesuaikan program transfer dana tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan, *dan*
6. Melaksanakan sistem pengawasan (berbasis masyarakat dan institusi) terhadap kematian ibu dan bayi.

Kegiatan Analisis dan Konsultasi Bank Dunia:
- Penguatan Sistem Kesehatan untuk Kesehatan Ibu

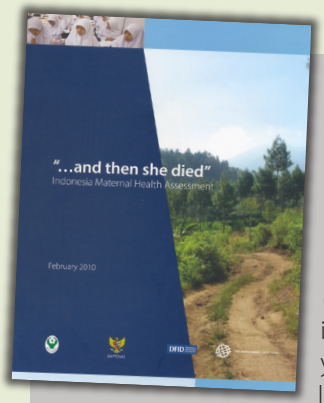

...dan kemudian dia pergi

Laporan ini berisi kajian dari kebijakan pemerintah saat ini dan program-programnya di bidang kesehatan ibu. Pendekatan yang berlaku di Indonesia sekarang, yang menekankan pada penggunaan bidan untuk proses kelahiran dan intervensi berbasis masyarakat, belum memberikan hasil yang diharapkan. Walaupun jumlah bidan sudah bertambah, pola penugasannya masih belum seimbang dan banyak daerah terpencil tidak punya akses terhadap bidan. Pelatihan bidan masih jauh di bawah standar. Pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit, yang menjadi elemen kunci dari sistem rujukan yang dirancang untuk mengatasi keadaan darurat saat terjadi komplikasi pada kelahiran, tidak berfungsi dengan baik, dan dokter ahli kandungan tidak dengan mudah dapat dijumpai di mana-mana. Penggunaan dukun bayi yang jasanya masih terus dimanfaatkan dan melahirkan di rumah adalah faktor penunjang angka kematian ibu. Jika Indonesia ingin segera mengurangi angka kematian ibu, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- Mengatasi kesenjangan sumber daya manusia;
- Menjadikan dokter ahli kandungan lebih mudah dijumpai di mana-mana;
- Meningkatkan hubungan antara fasilitas melahirkan berbasis masyarakat (seperti fasilitas bidan desa atau bidan swasta) dengan layanan rumah sakit;
- Menstandarkan kualitas layanan pada seluruh sistem; *dan*
- Memanfaatkan berbagai kesempatan di dalam rencana asuransi kesehatan nasional.

Asuransi Kesehatan

Pada 2004, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh rakyatnya melalui skema asuransi kesehatan masyarakat yang bersifat wajib. Asuransi ini sudah melindungi sekitar 76,4 juta masyarakat miskin dan mendekati miskin, dibiayai melalui APBN. Meski demikian, lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak terjangkau asuransi kesehatan, dan dampak fiskal menyeluruh dari program pemerintah untuk orang miskin belum benar-benar dikaji atau dirasakan.

Selain itu, kekurangan yang signifikan dalam hal efisiesi dan kesetaraan sistem kesehatan sekarang, jika tidak segera diatasi, akan memperburuk tekanan biaya yang dapat menghalangi pelaksanaan yang efektif dari cakupan menyeluruh dan hasil yang diinginkan dari perbaikan dalam kesehatan masyarakat dan perlindungan finansial.

Biaya Awal Asuransi Kesehatan Sekarang

Jumlah Penduduk 2010 telah disesuaikan dan dihitung

Biaya awal rendah

Asumsi:

- Tambahkan 10% biaya administrasi
- Kontrol biaya berhasil melalui layanan yang terkelola dengan tekanan pada layanan primer
- Tambahkan biaya yang harus ditanggung penderita sebesar 30 persen
- Tambahkan subsidi sisi penawaran sebesar 20 persen

Rp. 18.704 *per anggota per bulan*

Biaya awal menengah

Asumsi:

- Tambahkan 10 persen pada biaya farmasi tahun 2010
- Tambahkan biaya administrasi sebesar 10 persen
- Biaya subsidi sisi penawaran dan yang dibiayai penderita adalah 30 persen

Rp. 20.530 *per anggota per bulan*

Biaya awal tinggi

Asumsi:

- Tambahkan 10 persen pada biaya farmasi tahun 2010
- Tambahkan 10 persen biaya administrasi
- Biaya subsidi sisi Penawaran dan yang dibiayai penderita adalah 50 persen

Rp. 25.662 *per anggota per bulan*

Biaya awal Jabodetabek

Asumsi:

- Tambahkan 10 persen pada biaya farmasi tahun 2010
- Tambahkan 10 persen pada biaya administrasi
- Biaya subsidi sisi Penawaran dan yang dibiayai penderita) adalah 50 persen

Rp. 35.627 *per anggota per bulan*

Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Pada tahun 2010, Bank Dunia mengadakan latihan biaya penafsiran asuransi (*actual costing)* untuk membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan perkiraan awal *(baseline estimates)* bagi biaya program asuransi program yang sedang berlangsung saat ini dan untuk melaksanakan analisis penafsiran asuransi *(actual analyses)* pada biaya-biaya beberapa pilihan untuk meraih cakupan menyeluruh bagi asuransi kesehatan.

Memberikan Perhatian Lebih pada Kesehatan: Menelaah Ruang Fiskal (Fiscal Space) untuk Kesehatan di Indonesia

Laporan ini menganalisis persoalan ruang fiskal terkait belanja pemerintah untuk sektor kesehatan. Ruang fiskal merujuk pada kemampuan pemerintah untuk menambah pengeluaran demi tujuan tertentu.

Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia menyisihkan 5,3% dari anggarannya untuk kesehatan, tapi pengeluaran kesehatan total dan pengeluaran kesehatan pemerintah per kapita adalah rendah dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, sama rendah jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan. Indonesia hendaknya meningkatkan belanja kesehatannya di masa depan, sejalan dengan upaya memperluas akses layanan kesehatan melalui perluasan skema asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan mendekati miskin. Selain itu, perubahan demografis dan epidemiologis di negara menunjukkan kecenderungan meningkatnya permintaan dalam jumlah besar terhadap kebutuhan akan jasa kesehatan dan layanan yang lebih canggih. Beberapa pendorong ruang fiskal bagi kesehatan di Indonesia akan dibahas dalam laporan ini, serta pilihan kebijakan bagi Indonesia agar Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menambah sumber daya bagi sektor kesehatan.

Pendidikan Anak Usia Dini

Usia dini adalah masa kritis bagi perkembangan karena menjadi dasar bagi keterampilan dan kecerdasan yang akan dibawa hingga usia dewasa. Pengakuan tentang hal ini berasal dari bukti ilmiah yang menunjukkan pesatnya perkembangan otak sebelum anak berusia enam tahun, dan bagaimana perkembangan otak dipengaruhi oleh lingkungan anak, seperti rangsangan, pengasuhan, dan gizi yang diberikan di rumah dan di luar rumah. Layanan berkaitan usia dini terbukti sangat efektif jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, dan hasilnya tampak dalam bentuk kesiapan bersekolah, kelulusan sekolah, kesehatan, kemampuan kognitif, dan kecakapan sosial dan emosional.

Proyek Pendidikan Anak Usia Dini (*Early Childhood Education and Development Project* – ECED)

Kementerian Pendidikan Nasional mendukung proyek Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis masyarakat yang bertujuan menjangkau sekitar 738.000 anak di 50 kabupaten/kota dalam lima tahun.

Didanai oleh kredit dari *International Development Assistance* (IDA) dan hibah dari Pemerintah Kerajaan Belanda, proyek PAUD menyediakan hibah langsung bagi kelompok masyarakat, dan merekalah yang menentukan cara terbaik untuk memberikan layanan bagi anak usia dini. Proyek ini mendukung strategi pemerintah akan PAUD yang terintegrasi dan holistik, mencakup kesehatan, gizi, rangsangan dini dan pendidikan, serta upaya menjadi orang tua *(parenting)*. Proyek ini juga mendanai pelatihan guru berbasis masyarakat untuk mendorong pengembangan anak, dan membantu kerjasama dengan berbagai institusi di tingkat nasional dan kabupaten/kota yang menyediakan pendanaan tambahan dan pengendalian mutu. Selain itu, proyek ini juga mendukung terselenggaranya sistem jaminan mutu nasional dan sistem pengembangan profesional, yang akan memastikan keberlanjutan peningkatan dari layanan jasa PAUD.

Pada Januari 2010, Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan standar PAUD (Permendiknas No. 58/2009) yang kemudian direkatkan pada regulasi pemerintah (PP No. 17/2010) tentang pengelolaan dan operasional layanan pendidikan. Sejak September 2010, lebih dari 2.800 desa di 50 kabupaten/kota telah membentuk pusat PAUD.

Evaluasi Dampak

Untuk memahami apakah layanan PAUD memperbaiki perkembangan anak dan kesiapan mereka untuk masuk sekolah dasar, dan faktor-faktor apa yang menyumbang terhadap efektivitas layanan PAUD, Kemdiknas melaksanakan evaluasi dampak dengan dukungan dari Bank Dunia. Mengikuti perkembangan anak selama beberapa waktu akan membantu proyek PAUD mendapatkan informasi tentang status perkembangan anak usia dini dari anak yang menjadi sasaran, dan memberi tekanan pada wilayah yang memerlukan perhatian dan fokus lebih dari proyek. Terlebih lagi, hasil kegiatan PAUD diharapkan dapat membantu pengembangan kebijakan daerah dengan dukungan data lokal, yang hingga kini terbatas ketersediaannya. Meski telah banyak studi yang menjabarkan peta layanan PAUD di Indonesia, hasil awal dari survei ini adalah yang pertama menunjukkan hubungan antara pendidikan orang tua, gizi dan lingkungan belajar yang merangsang *(stimulating learning environment)* dan hasil perkembangan anak.

Evaluasi dampak ini menggunakan salah satu ukuran kesiapan berskolah yang paling banyak dikenal – Instrumen Perkembangan Dini *(Early Development Index - EDI)*. EDI adalah indikator relatif yang membandingkan sekelompok anak di beberapa wilayah geografis dan kemampuan mereka pada lima domain perkembangan (perkembangan bahasa dan kognitif, kesehatan dan kesejahteraan fisik, kompetensi sosial, kematangan emosional, keterampilan berkomunikasi dan pengetahuan umum). EDI menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan anak-anak di negara lain, anak-anak Indonesia unggul dalam hal komunikasi dan pengetahuan umum, serta kompetensi sosial, tetapi memiliki kelemahan dalam hal keterampilan yang berkaitan dengan baca tulis dan perkembangan kognitif. Artinya, anak-anak Indonesia lebih mandiri, dapat menyampaikan kebutuhan mereka, dan bertindak dengan sabar dan berperilaku sesuai norma sosial. Tetapi, tampaknya mereka memerlukan bantuan lebih jauh untuk meningkatkan keterampilan yang menjadi landasan bagi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, seperti mencacah, pengenalan angka, dan mengenal persamaan serta perbedaan.

"Saya bangga dengan PAUD," adalah hal pertama yang dikatakan Pak Zainal Mutaqin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten di Sukabumi, kepada Bank Dunia pada kunjungan bulan September 2010. PAUD adalah **Pendidikan Anak Usia Dini** atau *Early Childhood Education and Development (ECED)*. Masyarakat di Sukabumi sekarang memiliki akses ke pusat pendidikan anak usia dini melalui Proyek Pendidikan Anak Usia Dini, yang memberikan pelatihan untuk tim pelatih ahli dan fasilitator serta bantuan dana untuk masyarakat agar mereka dapat mendirikan pusat PAUD sendiri. Orangtua yang membawa anaknya mencari tempat untuk menunggu dan berkumpul. Sebagian besar orangtua melakukannya beberapa jam, empat kali seminggu, ketika mereka istirahat dari pekerjaan dan tugas dan bisa bercakap-cakap dengan tetangganya, sambil menjaga anak-anak mereka di dalam pusat PAUD. Dalam pusat PAUD juga terdapat Posyandu, para orangtua dapat bertemu dengan bidan desa atau petugas KB. Ada perasaan luar biasa ketika balai masyarakat tersebut menimbulkan kebanggaan, saat mendengar komentar orangtua yang melihat anak-anak mereka belajar dan berkembang melalui PAUD.

Pusat Pendidikan Anak Usia Dini "Cenderawasih" di dusun Puncak Manis memiliki lebih dari 20 anak. Dibangun dengan dana PNPM Generasi, pusat PAUD ini didirikan setahun lalu.

Sebelas fasilitator terlatih bergantian mengasuh anak-anak di pusat PAUD, mereka memberikan ide untuk memperbaiki program pembelajaran, mobilisasi sumber daya masyarakat, mengatasi masalah dan mengelola keuangan. Masyarakat telah mengadopsi ide-ide baru dengan pesat, khususnya jika mempertimbangkan betapa terbatasnya sumber daya mereka, dan mereka telah menyumbangkan lahan untuk mendirikan pusat PAUD. Pejabat pendidikan setempat sangat peduli pada program anak usia dini. Mereka menyiapkan rancangan peraturan daerah yang akan menata kerangka penyediaan layanan pendidikan anak usia dini. Pendekatan holistik yang didukung proyek PAUD telah dipraktikkan, hingga pemerintah kabupaten/kota sekarang mempromosikan penggunaan Posyandu sebagai pusat pembelajaran anak usia dini yang informal dan melatih 'kader' daerahnya untuk memberikan berbagai layanan.

Program yang Didukung Bank Dunia:
- ECED (Pendidikan Anak Usia Dini)

Kesehatan dan Gizi Sekolah

Pendidikan dan status ekonomi sebuah negara terkait erat dengan status kesehatannya: kesehatan dan gizi yang lebih baik akan memperkuat pendidikan dan ekonomi. Anak-anak yang lebih sehat dan bergizi baik akan bersekolah lebih lama, belajar lebih banyak, dan menjadi orang dewasa yang lebih sehat dan produktif. Mengatasi soal gizi dan kesehatan anak usia sekolah akan menghasilkan lebih dari status kesehatan dan kapasitas belajar yang lebih baik; karena juga akan berdampak pada gizi antargenerasi, manfaat kesehatan, dan keuntungan ekonomi jangka panjang.

Anak perempuan yang bersekolah cenderung menunda kehamilan lebih lama dibandingkan anak perempuan putus sekolah, dan menunda kehamilan membawa manfaat lain yaitu angka kelahiran lebih rendah, kelahiran yang lebih baik, serta kesehatan anak yang lebih baik. Anak usia sekolah dengan tingkat penyakit yang rendah akan mengurangi penularan penyakit kepada masyarakat luas. Manfaat dari kesehatan dan gizi yang lebih baik pada usia sekolah adalah kombinasi dari seluruh keuntungan jangka pendek dan panjang yang telah disebutkan.

Kesehatan dan Gizi Sekolah

Intervensi kesehatan dan gizi sekolah adalah investasi yang penting bagi pendidikan karena kesehatan dan gizi buruk pada anak sekolah menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Penyakit dan gizi buruk mempengaruhi anak sepanjang masa anak-anaknya. Meskipun penyakit dan gizi buruk berisiko rendah pada anak-anak usia sekolah, kedua hal tersebut berdampak besar pada partisipasi dan kemajuan di sekolah dan pembelajaran.

Laporan ini menilai situasi dan kebijakan terkini atas kesehatan dan gizi di sekolah, mekanisme kelembagaan, dan kegiatan kesehatan dan gizi sekolah dalam sektor pendidikan dasar di Indonesia. Laporan ini mengidentifikasi cara-cara untuk menguatkan dan mengembangkan intervensi kesehatan dan gizi sekolah demi mengatasi hambatan-hambatan utama bidang kesehatan dan gizi terhadap pembelajaran. Intervensi ini sangat hemat biaya dan memberi lebih banyak manfaat bagi orang miskin dan anak-anak yang kurang beruntung dibandingkan intervensi pendidikan lain.

Rekomendasinya antara lain:

- Sasaran intervensi kesehatan sekolah dan gizi adalah wilayah dengan hasil pendidikan rendah serta angka gizi buruk atau angka kelaparan tinggi.
- Memperkuat kerjasama dalam sektor pendidikan antara Kemdiknas dan Kemenag dan antara sektor kesehatan dengan pendidikan.
- Mengidentifikasi dan mengembangkan serangkaian "paket/model" yang mempertimbangkan tiga konteks utama di Indonesia (kota, desa, pulau/pantai) dan jenis sekolah.
- Memanfaatkan hasil intervensi kesehatan dan gizi tertentu yang berbiaya rendah dengan mengidentifikasi dan melaksanakan pendekatan tingkat kabupaten/kota untuk remediasi.

Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah *(Water and Sanitation for Low Income Comunities - WSSLIC 2)*

Menjangkau masyarakat miskin di berbagai desa yang miskin fasilitas di beberapa provinsi tertentu, proyek ini mendukung Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki status kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat desa. Proyek ini berfokus pada upaya memperbaiki perilaku sehat dan layanan kesehatan masyarakat terkait penyakit yang ditularkan melalui air, serta menyediakan sumber air *(water supply)* yang aman, layak, murah dan mudah diperoleh dan layanan sanitasi.

Dalam upaya membawa air bersih dan sanitasi yang lebih baik ke pedesaan, proyek WSSLIC 2 bekerja dengan institusi daerah seperti dinas pemerintahan setempat atau panitia desa untuk mengatur, merencanakan, mengelola dan menjaga layanan air dan sanitasi. Proyek ini juga bekerja dengan staf kesehatan masyarakat di tingkat desa untuk membangun kapasitas mereka. Selain itu, para fasilitator menggunakan pendekatan partisipatif untuk memupuk rasa memiliki masyarakat, hingga akhirnya memberdayakan mereka untuk menentukan pilihan dan tak hanya memikirkan air dan sanitasi, namun berpikir lebih tentang cara memperbaiki kualitas hidup secara umum.

Proyek WSSLIC 2 adalah tentang perubahan perilaku, jadi bekerja melalui program kesehatan masyarakat dan sekolah setempat dengan metode promosi partisipatif dalam pendidikan sanitasi dan kebersihan. Kegiatan yang sering dilakukan adalah pembangunan jamban dan tempat cuci tangan di sekolah, program pemberantasan cacing atau meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan kebersihan melalui kampanye media massa.

Desa-desa yang menginginkan akses pada sumber air bersih dan nyaman diminta menyiapkan proposal dan harus menyediakan kontribusi mereka sendiri agar dapat menerima dana proyek. Dengan cara ini, setiap desa lebih mungkin terus melindungi investasinya dan menjaganya agar terus berfungsi. Proyek ini berakhir pada tahun 2010 dan telah memberikan dampak yang jelas, yaitu ada lebih banyak orang di desa sasaran memiliki akses pada air bersih dan sanitasi, dengan perbaikan ini lebih sedikit orang yang terkena diare. Para perempuan di desa sasaran yang memiliki sumber air baru, sekarang dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk pendidikan anak-anak mereka dari pada mencari air.

Hasil WSSLIC

Evaluasi dampak terbaru menunjukkan pencapaian WSSLIC 2:

1. Meningkatkan akses pada air, khusunya bagi masyarakat miskin;
2. Bertambahnya waktu bagi perempuan untuk mendidik anak-anak mereka, daripada untuk mengambil air;
3. Bertambahnya akses pada sanitasi, dan
4. Berkurangnya kejadian diare.

Program yang Didukung Bank Dunia:

- WSSLIC 2 (Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah)

Pendidikan Dasar

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam memberikan akses pada pendidikan dasar, termasuk bagi penduduknya yang paling miskin. Akhir-akhir ini Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akses pada pendidikan dan memperbaiki kualitas dan tata kelola sistem pendidikannya serta telah mendedikasikan dana yang besar untuk sektor pendidikan. Indonesia diharapkan dapat meraih pendidikan dasar sembilan tahun secara universal pada beberapa tahun mendatang. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimulai pada tahun 2005 dan memberikan bantuan dana bagi sekolah dasar hingga menengah pertama di seluruh Indonesia. Program BOS mendanai sekolah berdasarkan perhitungan per siswa dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk meraih tonggak penting pendidikan.

Mutu pendidikan masih merupakan tantangan, khususnya untuk pendidikan dasar. Indonesia masih menduduki peringkat rendah dalam ujian berstandar internasional. Pada Program Internasional untuk Penilaian Siswa *(Program for International Student Assessment - PISA)* 2009 dan pada 2007 Tren Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam *(Trends in International Mathematics and Science Study - TIMSS)* 2007, lebih dari separuh siswa Indonesia yang diuji keterampilan matematikanya berada di bawah tingkat kemampuan dasar.

Dengan adanya desentralisasi, banyak tanggung jawab pengelolaan pendidikan beralih ke tingkat daerah, sehingga pengelolaan kabupaten/kota dan sekolah yang kuat menjadi sangat penting bagi kualitas dan efisiensi sistem pendidikan. Peningkatan kualitas dan layanan jasa pendidikan dasar sembilan tahun dalam hal pembelajaran siswa sangatlah penting dan akan didorong pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah.

Apa itu BOS?

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah upaya pemerintah untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi siswa dari berbagai tingkat kesejahteraan. Sejak tahun 2005, BOS telah mendistribusikan bantuan hibah ke seluruh sekolah di Indonesia berdasarkan pada hitungan per siswa. BOS merupakan program bantuan pendidikan pemerintah yang terbesar. Setiap kuartal, seluruh sekolah di Indonesia menerima bantuan pengeluaran operasional berdasarkan jumlah siswa di tiap sekolah. Nilai total program BOS adalah lebih dari Rp. 19 trilyun per tahun.

BOS-KITA (*Knowledge Improvement for Transparency and Accountability* - Perbaikan Pengetahuan untuk Transparansi dan Akuntabilitas)

BOS-KITA didukung oleh Bank Dunia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. BOS-KITA dirancang untuk meningkatkan program BOS dengan cara memperkuat komite sekolah, meningkatkan peran serta masyarakat, dan memperbaiki perencanaan dan pengawasan pengeluaran demi transparansi dan akuntabilitas dana BOS. Pada tingkat sekolah menengah pertama, BOS membantu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dari anak-anak yang termiskin dari 52% pada tahun 2006 menjadi 59% pada tahun 2009, sambil juga meningkatkan angka kelulusan mereka dari 50% menjadi 55% pada periode ini (Survei SUSENAS).

Pelatihan BOS 2011

Kemdiknas memimpin penggalangan dukungan para mitra pembangunan untuk mendukung program pelatihan BOS nasional pada tahun 2011. *Basic Education Capacity Trust Fund* (dikelola Bank Dunia dan didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Kerajaan Belanda) bekerjasama dengan Program Pendukung Kapasitas Sektor Pendidikan Dasar (*Basic Education Sector Capacity Support Program*, dikelola oleh Asian Development Bank dan didanai oleh Uni Eropa), USAID, dan AusAID membantu Kemdiknas merancang dan melaksanakan pelatihan yang lebih baik bagi kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah menggunakan bahan-bahan yang dikembangkan oleh proyek pendidikan yang didanai para donor. Kemdiknas melaksanakan program Pelatihan untuk Pelatih pada akhir tahun 2010 bagi 1.500 pelatih di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2011, para pelatih tersebut akan memulai pelatihan di seluruh negeri, dengan tujuan untuk menjangkau lebih dari 250.000 sekolah. Materi pelatihan mencakup penilaian mandiri sekolah, perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, alat pelaporan sekolah (TRIMS) dan berita terkini tentang program BOS. JICA berencana menggunakan bahan pelatihan tersebut di kabupaten-kabupaten yang didukungnya.

Pemantauan dan Evaluasi BOS & Penanganan Keluhan

Tim BOS-KITA telah bekerja dengan pemerintah untuk mengembangkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang lebih baik untuk program BOS yang akan memudahkan pengelolaan dan pelaporan. Dengan sistem yang terstandar ini, kegiatan membandingkan beberapa kabupaten/kota akan lebih mudah. Sistem ini telah diujicobakan di tiga provinsi dan enam kabupaten/kota. Saat ini, sistem tersebut sedang dilaksanakan oleh pengelola BOS pusat, yaitu Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan tiga kabupaten/kota. Sistem ini diharapkan akan diluncurkan di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2011 ketika program BOS didesentralisasikan.

Selain itu, Kemdiknas telah memiliki kebijakan satu pintu untuk informasi publik dan layanan penanganan keluhan. Kemdiknas meluncurkan saluran 177 yang dapat diakses melalui berbagai alat komunikasi, termasuk SMS. Saluran 177 memerlukan koordinasi yang lebih baik pada seluruh tingkat untuk memastikan bahwa keluhan atau komentar apa pun direkam, diproses, dan segera ditanggapi dengan baik dan benar oleh unit yang tepat. Tim BOS-KITA telah membantu menyiapkan Prosedur Operasional Standar untuk memperjelas hal ini. Segala perbaikan sistem baru telah disampaikan kepada kabupaten/kota melalui DVD interaktif dengan format yang mudah digunakan, dengan harapan bahwa ini akan menuju pada program BOS yang lebih baik bagi semua.

Poster ini dibuat bersama Kementerian Pendidikan Nasional sebagai bagian dari kampanye nasional untuk menyampaikan informasi kepada komunitas orangtua dan sekolah tentang program BOS.

Kampanye Informasi Sosial

Kemdiknas meluncurkan kampanye informasi sosial nasional untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas BOS. Dengan dukungan Bank Dunia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, kampanye tersebut mengandung pesan kunci tentang pentingnya pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana BOS oleh sekolah dan bagaimana orangtua dapat mendukung hal tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, "masyarakat harus terlibat untuk memastikan bahwa program BOS, yang menyerap trilyunan Rupiah dana pemerintah, tepat sasaran." Beliau juga mengutip temuan terkini dari survei Bank Dunia pada 720 sekolah yang dipilih secara acak, yang menunjukkan bahwa orangtua tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang program BOS sehingga mereka dapat memantau penggunaan dananya dengan efektif, meskipun 86% dari orangtua tersebut telah mendengar tentang program BOS. Kampanye baru ini akan meningkatkan kesadaran melalui TV, radio dan media cetak, dan juga akan mempromosikan nomor telepon bebas pulsa baru untuk keluhan dan umpan balik. Kampanye nasional ini dilengkapi dengan survei kabupaten/kota, yang akan mengungkap cara terbaik untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program BOS.

Basic Education Capacity Trust Fund

Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) membantu 50 pemerintah daerah di sembilan provinsi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memanfaatkan informasi untuk merencanakan, mengelola, dan memantau tata kelola dan layanan pendidikan. BEC-TF menggunakan kombinasi alat-alat dan pendekatan, seperti Asesmen Kapasitas Pemerintah Daerah *(Local Government Capacity Assessment)*, Rencana Pengembangan Kapasitas *(Capacity Development Plans)*, Hibah Pendidikan Dasar Daerah *(Local Basic Education Grants)*, dan Analisis Pengeluaran Publik untuk Pendidikan *(Education Public Expenditure Analysis)* untuk:

- mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyusun anggaran daerah, fisik, dan keputusan alokasi staf;
- memperbaiki tata kelola daerah dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, proses anggaran yang lebih baik, serta pembiayaan yang berbasis kinerja, pengelolaan keuangan dan akunting yang lebih baik, dan
- memperkuat kapasitas informasi saat ini dan sistem penilaian kinerja untuk memperbaiki akses pemangku kepentingan terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu.

Dialog Pendidikan Tematis dan Penilaian Sektor Pendidikan *(Thematic Education Dialog and Education Sector Assessment)*

Dengan dukungan dari BEC-TF, Dialog Pendidikan Tematis *(Thematic Education Dialog – TED)* adalah forum diskusi kebijakan yang mempertemukan pejabat pemerintah senior dan mitra pembangunan agar dapat memberikan rekomendasi strategis dan kebijakan dalam hal reformasi pendidikan dan isu-isu pembangunan, termasuk pencarian sumber daya dan perencanaan. Diskusi TED digunakan untuk menyampaikan informasi persiapan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Mulai tahun 2008, TED berfokus pada serangkaian isu yang telah disepakati bersama di bawah Penilaian Sektor Pendidikan *(Education Sector Assessment – ESA)*. ESA menggunakan pendekatan berbasis temuan untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan sektor pendidikan melalui debat dan diskusi, sehingga dapat turut membangun kesepakatan tentang isu-isu pembangunan yang penting, yaitu: 1. Memperbaiki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja; 2. Meneliti dan fokus ulang pendidikan non-formal; 3. Penyediaan pendidikan dasar 4. Ujian nasional; 5. Pengangkatan dan penempatan guru; 6. Mutu dan sertifikasi guru; 7. Pembiayaan sektor pendidikan; 8. Pendidikan tinggi.

Berapa laporan penting yang dikeluarkan ESA telah diterbitkan. Sebagai kelanjutkan dari ESA dan untuk lebih menggali isu yang sedang hangat, pemerintah meminta BEC-TF untuk mendukung satuan tugas antarkementerian tentang pengembangan keterampilan kaum muda dengan bantuan teknis dan pekerjaan analitis, dukungan berlanjut bagi pendidikan dasar dengan fokus pada rencana desentralisasi program BOS, dialog tindak lanjut dan kerja analitis pada pembiayaan dan strategi pendidikan tinggi, fokus pada strategi pendidikan menengah, dan kajian pengeluaran publik untuk pendidikan.

Analisis Pengeluaran Publik untuk Pendidikan *(Education Public Expenditure Analysis)*

Analisis Pengeluaran Publik untuk Pendidikan atau EPEA adalah alat yang dikembangkan Bank Dunia untuk membantu pemerintah daerah melihat cara mereka mengelola uang, guru, ruang kelas dan sumber daya pendidikan lainnya selama lima tahun terakhir dan kemudian memutuskan apakah mereka ingin mempertahankan cara tersebut di kemudian hari. Fokus kegiatan ini adalah pada menggunakan informasi lokal untuk membuat keputusan yang bersifat lokal. Hal ini membuat manajer dapat menggunakan data kabupaten/kota mereka untuk membuat keputusan yang akan membantu mereka mencapai tujuan nasional secara keseluruhan untuk angka kelulusan siswa, rasio guru-siswa, dan lain-lain.

BEC-TF mengembangkan tujuh modul pelatihan untuk digunakan para pelatih dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan daerah untuk melatih staf di daerah dan pemangku kepentingan pendidikan daerah dalam topik-topik dalam kelima bidang strategis dari tata kelola pendidikan (transparansi dan akuntabilitas, standar penyedia layanan pendidikan, sistem kendali manajemen, sistem manajemen informasi, efisiensi pemanfaatan sumber daya), analisis pengeluaran publik untuk pendidikan, dan pengarusutamaan gender. Modul-modul terdiri dari bahan yang lengkap untuk para pelatih, seperti presentasi *powerpoin*t dan bahan bacaan rujukan tentang peraturan terbaru. Bahan-bahan juga digunakan secara luas oleh para penyedia layanan untuk memberikan pelatihan setempat.

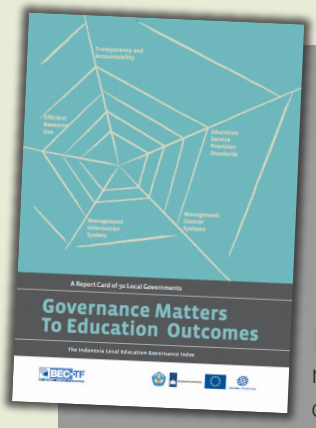

Asesmen Kapasitas Pemerintah Daerah *(Local Government Capacity Assessment - LGCA)*

LGCA adalah alat yang dikembangkan Bank Dunia untuk membangun Indeks Pemerintah Daerah (Indonesia Local Government Index - ILEGI) yang membuat peringkat 50 pemerintah daerah berdasarkan kinerja mereka dan memasukkan mereka dalam kategori hijau-kuning-merah. LGCA dan ILEGI mengungkap bahwa hasil pendidikan dan tata kelola pendidikan sangat berhubungan. Hasil LGCA akan membantu pemerintah daerah mengetahui kekuatan mereka dan bidang-bidang yang harus diperbaiki dalam lima Bidang Strategis Tata Kelola Pendidikan.

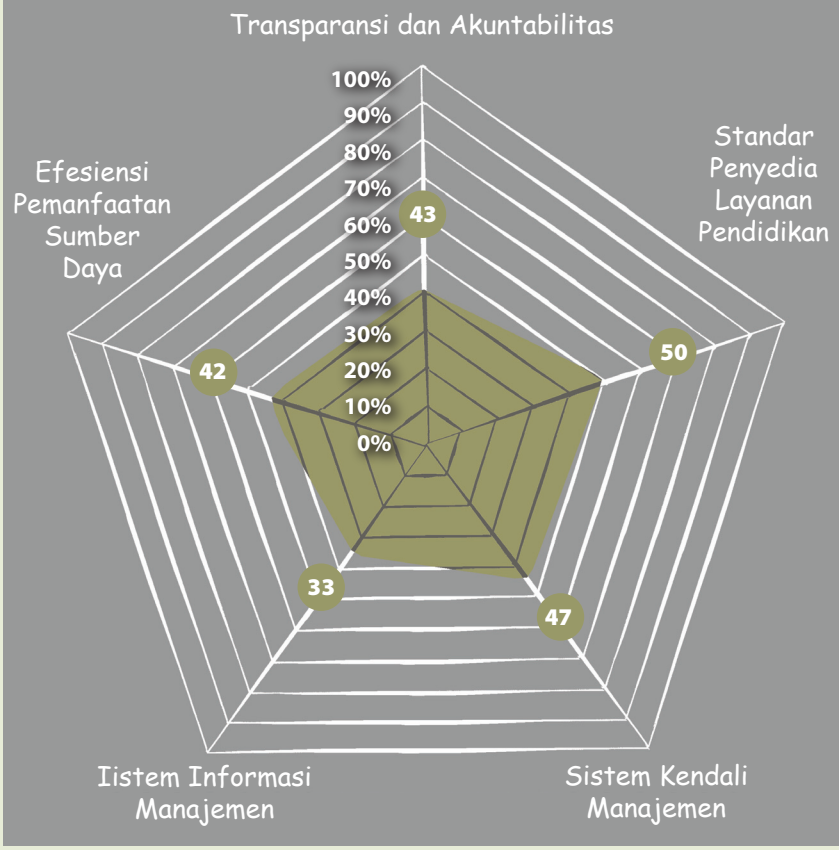

Lima Bidang Strategis Tata Kelola Pendidikan

LGCA mengukur kinerja dan kapasitas sektor pendidikan melalui lima bidang strategis tata kelola pendidikan:

- Transparansi dan Akuntabilitas;
- Standar Penyedia Layanan Pendidikan;
- Sistem Kendali Manajemen;
- Sistem Informasi Manajemen;
- Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya.

KLASIFIKASI KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH

Tinggi (nilai di atas 60%)
Menengah (nilai antara 40-60%)
Rendah (nilai antara 20%)

Jaring Laba-laba ini dibuat berdasarkan LGCA untuk seluruh 50 pemerintah daerah BEC-TF. Secara grafis, gambar ini menunjukkan kekuatan dan kelemahan tiap pemerintah daerah dalam lima bidang strategis. Semakin rendah persentasenya, semakin lemah kinerja pemerintah daerah dalam suatu wilayah strategis tertentu; semakin tinggi angka persentasenya, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Nilai pemerintah daerah berkisar antara 19% hingga 62% untuk seluruh bidang strategis. Contohnya, dalam jaring laba-laba ini, nilai terendah pemerintah daerah adalah 33% untuk Sistem Informasi Manajemen , dan nilai tertinggi adalah 50% untuk Standar Penyedia Layanan Pendidikan.

Program yang Didukung Bank Dunia:
- BOS KITA
- BEC-TF *(Basic Education Capacity Trust Fund)*
- DESP *(Dutch Education Support Program)*

Reformasi Guru

Ada bukti yang jelas bahwa guru adalah faktor terpenting dalam kualitas pendidikan. Beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melaksanakan reformasi besar-besaran dalam bidang perbaikan kualitas guru. Pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, hanya 18% dan 67% guru yang memiliki kualifikasi wajib yaitu gelar S1 dari pendidikan tinggi empat tahun. Sebagian besar guru sekolah dasar hanya lulus dari sekolah menengah tingkat atas. Berlakunya Undang-undang tentang Guru dan Dosen (UU no. 14/2005) mengawali perjalanan Indonesia melaksanakan reformasi guru paling ambisius sedunia, dengan hampir 3 juta guru terpengaruh oleh undang-undang tersebut.

Peraturan tersebut mewajibkan guru untuk memiliki setidaknya gelar S1 dari pendidikan tinggi empat tahun dan mandat bahwa guru harus disertifikasi. Sebagai insentif tambahan, guru yang telah disertifikasi layak menerima "tunjangan profesi" yang sama dengan gaji dasar guru dan ada bukti bahwa calon dengan kemampuan yang lebih tinggi tertarik pada profesi guru. Legislasi juga langsung menyebabkan perbaikan pada pelatihan pra-jabatan guru dan banyak inisiatif dijalankan untuk membekali guru dengan keterampilan yang mereka perlukan untuk memenuhi standar baru yang lebih tinggi.

Di dalam Kelas Matematika Indonesia: Studi Video TIMSS tentang Praktik Mengajar dan Prestasi Siswa

Studi ini menganalisis studi kasus video dari pembelajaran matematika di kelas, memberikan bukti kuantitatif dan kualitatif sebagai informasi dan untuk memandu keputusan kebijakan di masa depan. Studi ini mendapatkan bahwa dibandingkan dengan siswa dan guru dari negara peserta lain, Indonesia menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan non-matematika dan kegiatan di luar pemecahan masalah dan kurang menghabiskan waktu untuk mengkaji dan menilai. Guru-guru Indonesia relatif sedikit memberikan soal pemecahan masalah tingkat tinggi *(higher-order thinking problems)*. Soal pemecahan masalah oleh siswa seringkali hanya mengulang contoh dari guru. Studi ini juga menemukan bahwa siswa Indonesia jarang mengeluarkan pendapat di kelas dibandingkan rekan internasional mereka.

Rekomendasinya adalah:

- Mendorong kebijakan Kemdiknas tentang Belajar Aktif *(Active Learning)*, yang didukung oleh temuan bahwa siswa yang lebih aktif berpartisipasi memiliki nilai ujian yang lebih tinggi;
- Menggabungkan teknik video pada kegiatan pengembangan guru untuk evaluasi refleksi diri dan refleksi sebaya;
- Membuat video praktik pengajaran sebagai sumber referensi;
- Mengkaji kebijakan yang ada untuk menggabungkan dua jam pelajaran matematika dan penggunaan kalkulator di kelas.

Pendidikan yang Lebih Baik melalui Manajemen Reformasi dan Peningkatan Kualitas Akademik Guru yang Universal *(Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading - BERMUTU)*

BERMUTU menjadi efektif pada tahun 2005. Ini adalah proyek kompleks yang bekerja pada berbagai tingkat. Pada tingkat yang paling luas, proyek ini mendukung kebijakan dan pengembangan strategis dengan berkontribusi pada kerangka pengaturan guru. Dukungan BERMUTU telah tampak pada perundang-undangan penting tentang pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar, induksi dan akuntabilitas guru, serta sistem insentif untuk meningkatkan karir dan kinerja.

Proyek ini mengenalkan program hibah inovatif. Melalui hibah tersebut, lembaga pendidikan tenaga kependidikan menerima dukungan untuk memperkuat program Sarjana 1 guru selama empat tahun. BERMUTU juga memperkuat mekanisme jaminan mutu pemerintah melalui Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT). Semua guru di seluruh kabupaten/kota sasaran proyek telah menikmati proyek ini. Para guru tersebut berkesempatan meningkatkan pengetahuan tentang mata pelajaran dan keterampilan mengajar melalui kelompok kerja guru dan kepala sekolah di gugus sekolah dan melalui pendidikan jarak jauh. BERMUTU memperbaiki sistem pemantauan guru saat ini agar nilai tanggapan *(response rate)*, ketepatan waktu dan kemampuan memantau proses sertifikasi guru dan akan mendukung lebih lanjut pengembangan sistem pemantauan waktu yang dihabiskan "saat bertugas" *(on task)* dan metode pengajaran di kelas. Rentang pengaruh BERMUTU mulai dari penajaman pelatihan guru pra-jabatan, program induksi guru baru hingga pengembangan profesional berkesinambungan. Dengan demikian, BERMUTU memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi para guru melalui berbagai cara.

Transformasi Tenaga Pendidikan Indonesia

Studi ini menemukan bahwa Indonesia memiliki rasio siswa-guru paling rendah di dunia dan ada sekitar 20% kelebihan jumlah guru. Perbedaan muncul dari distribusi guru yang tidak seimbang. Ada terlalu banyak guru yang ditugaskan di beberapa sekolah dan terlalu sedikit di beberapa sekolah lainnya. Hal ini tampak jelas ketika melihat jumlah guru di kota, desa dan daerah terpencil. Ada 68% sekolah di kota dan 52% sekolah di desa yang memiliki terlalu banyak guru, sedangkan dua pertiga sekolah di daerah terpencil memiliki terlalu sedikit guru. Isu distribusi tersebut harus diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota. Sebanyak 47% sekolah dasar di Indonesia memiliki kurang dari 150 siswa dan di sekolah tersebut khususnya, pengajaran kelas rangkap akan menjadi cara ideal untuk mengatasi masalah efisiensi dan kualitas. Kasus serupa terjadi pada sekolah menengah tingkat pertama. Melatih guru yang dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan menciptakan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar.

Karena gaji guru menghabiskan lebih dari separuh pengeluaran sektor pendidikan, pengaturan staf yang tidak efisien akan menjadi sangat merugikan. Kelebihan guru dalam jumlah besar dan distribusi guru yang tidak seimbang harus diatasi, khusunya karena "tunjangan profesi" baru untuk guru dengan sertifikat memperburuk situasi ini. Saat ini, kelebihan jumlah guru sebesar 20% menimbulkan kerugian lebih 10% dari anggaran pendidikan total.

Rekomendasi yang diberikan adalah menetapkan kebijakan untuk:

- Mendorong konversi menjadi pengajaran kelas rangkap pada tingkat dasar dan pengajaran mata pelajaran ganda di sekolah menengah pertama;
- Identifikasi dan mengelola guru yang kurang berprestasi;
- Mengharuskan semua guru baru untuk mempraktikkan pengajaran yang efektif sebelum mereka jadi karyawan tetap;
- Memastikan promosi staf di sekolah ditentukan oleh proses prestasi yang transparan;
- Mengubah Undang-undang Guru dan Dosen dengan menyertakan penilaian guru baru oleh kepala sekolah pada akhir tahun percobaan sebagai bagian dari proses sertifikasi guru;
- Mengembangkan skema penilaian kinerja untuk guru terkait dengan kenaikan gaji rutin.

Tinjauan analitis Bank Dunia terhadap pengangkatan dan penempatan guru menegaskan bahwa kelebihan jumlah guru dan distribusi yang buruk adalah sumber pemborosan sektor pendidikan. Sebagai solusi, pemerintah menetapkan kebijakan pada tahun 2007, yang mengharuskan setiap guru untuk mengajar setidaknya 24 jam pelajaran setiap minggu agar dapat menerima tunjangan profesi.

Tinjauan analitis Bank Dunia juga melihat bagaimana mengelola sejumlah besar guru yang tidak berkualitas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58/2008 dikeluarkan agar universitas mengakui pengalaman kerja dan hasil belajar guru, sehingga mengurangi jumlah nilai kredit yang diperlukan guru untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

Evaluasi Dampak Undang-undang Guru dan Dosen

Dalam mendukung upaya nasional untuk memperbaiki kualitas guru, BERMUTU melakukan evaluasi dampak terhadap inisiatif Indonesia yang paling mahal dan ambisius dalam bidang pendidikan - yaitu berlakunya Undang-undang Guru dan Dosen yang ditetapkan pada tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa hingga tahun 2015 seluruh guru harus memiliki sertifikat profesional. Evaluasi ini berusaha memahami efektivitas kebijakan ini, khususnya apakah sertifikasi memperbaiki kompetensi guru yang sudah ada dan yang masih baru, serta kelak akan menuju pada hasil siswa yang lebih baik. Data awal dikumpulkan pada bulan November 2009 dan hasil dampak akan tersedia pada akhir tahun 2011 dan akhir tahun 2012.

Program yang Didukung Bank Dunia:

- BERMUTU *(Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading)*
- DESP *(Dutch Education Support Program)*

Pendidikan Menengah dan Keterampilan

Meskipun angka partisipasi sekolah menengah terus meningkat, hanya 7% dari orang Indonesia yang berusia antara 25 dan 64 tahun yang mendapat beberapa tahun pendidikan tinggi dan hanya satu dari lima orang yang menyelesaikan sekolah menengah tingkat atas. Hambatan utama pada partisipasi adalah biaya mahal, khususnya bagi rakyat miskin dan anggapan rendahnya kualitas pendidikan. Kurangnya jumlah sekolah menengah juga menjadi masalah besar. Tantangan utama dalam pendidikan menengah adalah menetapkan dasar yang kokoh untuk pembelajaran tingkat lanjut sambil memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mereka yang sudah siap untuk masuk ke dunia kerja.

Saat ini, lulusan sekolah menengah memiliki kesenjangan yang serius dalam hal keterampilan praktis (seperti pemecahan masalah, berpikir kreatif, kepemimpinan, orientasi tim, kemampuan bekerja mandiri dan kemampuan berbahasa Inggris serta komputer). Keterampilan yang tidak sesuai menghambat kesempatan kerja para pekerja. Lebih jauh lagi, tuntutan keterampilan berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Membangun sistem pengembangan keterampilan yang adaptif dalam kerangka belajar seumur hidup akan menjadi fokus yang penting. Untuk memperbaiki kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, pendidikan menengah tingkat atas dan reformasi keterampilan kaum muda akan diperlukan dengan fokus pada penguatan kurikulum, memperbaiki kualitas pengajaran, memenuhi permintaan akan ekspansi dan menjamin kesetaraan.

Belajar Seumur Hidup

Meskipun prestasi pendidikan secara keseluruhan meningkat, pada usia 15 tahun, hampir 50% siswa berhenti sekolah. Separuh kaum muda Indonesia memasuki pasar tenaga kerja sebelum usia 19 tahun, namun prospek pekerjaan jauh dari ideal. Angka pengangguran kaum muda tinggi dan banyak dari mereka yang terpaksa bekerja sendiri. Hal ini dikarenakan buruknya kualitas pendidikan dan tidak layaknya keahlian yang diajarkan sektor pendidikan. Pendidikan formal memberikan fondasi yang kritikal bagi kemampuan individu untuk belajar sepanjang usia mereka. Belajar seumur hidup antara lain:

- Pendidikan formal: untuk membangun fondasi bagi belajar seumur hidup;
- Masa pra-kerja *(pre-employment)*: untuk merangsang pelatihan non-pemerintah yang lebih sesuai dengan pasar *(market driven)*, untuk sektor pekerjaan formal dan informal;
- Pelatihan sambil bekerja *(on-the-job training)*;
- Pelatihan antar pekerjaan untuk meningkatkan dan mendapatkan keterampilan baru yang nilainya cepat turun karena perubahan teknologi yang juga cepat.
- Pelatihan untuk kelompok yang rentan, antara lain *drop-outs*.

Bank Dunia melaksanakan analisis biaya pemerintah daerah dan pengaturan pembiayaan pengembangan keterampilan kaum muda dan belajar seumur hidup dalam upaya menentukan apakah Indonesia telah menginvestasikan sumber daya pemerintah yang cukup untuk pengembangan keterampilan, dan apakah sumber daya tersebut telah dialokasikan dan dimanfaatkan dengan efisien dan adil. Bank Dunia juga memformulasikan rekomendasi kebijakan untuk membangun suatu sistem pendidikan seumur hidup yang terintegrasi, mengkaitkan pendidikan dan pelatihan dengan pasar tenaga kerja.

Pendidikan, Pelatihan, dan Hasil Pasar Tenaga Kerja untuk Kaum Muda Indonesia

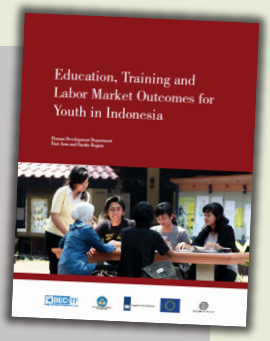

Laporan ini menganalisis tren pasar kerja dan memberikan sekilas tentang penyebab potensial kesulitan kaum muda Indonesia menghadapi transisi dari sekolah ke pasar kerja. Laporan ini juga mengidentifikasi dampak temuan-temuan ini bagi sektor pendidikan menengah tingkat atas dan pelatihan kejuruan.

Transisi dari sekolah ke pasar kerja menjadi sulit bagi seluruh kaum muda karena kurangnya keterampilan. Separuh siswa yang memulai sekolah dasar putus sekolah sebelum menyelesaikan sekolah menengah. Hal ini lebih banyak terjadi di pedesaan dan di antara masyarakat miskin.

Mereka yang lulus dari sekolah menengah atas menghadapi tingkat pengangguran tinggi dan kurangnya akses pada pekerjaan yang digaji *(salaried jobs)*. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan *(skilled jobs)* belum dapat menyamai laju perkembangan pencapaian pendidikan meski pekerjaan non-pertanian makin berperan penting. Studi ini menemukan bahwa pemberi kerja menilai 25% dari kualitas lulusan sekolah menengah adalah buruk dan menemukan kesenjangan yang besar dalam keterampilan umum (perilaku, pemecahan masalah, kemampuan berpikir).

Rekomendasi untuk hal ini meliputi:

- Mencegah putus sekolah dini untuk memperbaiki hasil pasar tenaga kerja bagi kaum muda;
- Memperbaiki kualitas pembelajaran, memperluas dasar keterampilan, dan menggali alternatif cara untuk penyampaian pendidikan kejuruan;
- Meningkatkan keterkaitan dengan sektor swasta.

Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Inovasi

Sektor pendidikan tinggi Indonesia berkembang pesat sejak kemerdekaan. Sekarang ada hampir empat juta mahasiswa yang terdaftar pada lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Ekspansi ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan tinggi swasta. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 130 lembaga pendidikan tinggi negeri dan lebih dari 3.000 lembaga pendidikan tinggi swasta. Meski lembaga pendidikan tinggi negeri hanya sebanyak 4% dari jumlah total lembaga, mereka menguasai 32% dari mahasiswa terdaftar sedangkan 68% lainnya terdaftar pada lembaga pendidikan tinggi swasta.

Karena penambahan jumlah penyelenggara pendidikan swasta, angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia telah melampaui pertumbuhan populasi, sekitar 27% dari penduduk berusia 18-22 tahun terdaftar pada perguruan tinggi. Meski angka partisipasi bertambah dengan stabil, akses ke pendidikan tinggi bagi penduduk pedesaan dan kelompok yang kurang beruntung secara sosial-ekonomi masih mengkhawatirkan di Indonesia. Pemerintah juga peduli untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang paling dibutuhkan oleh ekonomi yang berkembang pesat dan strukturnya selalu berubah dalam ekonomi global yang kompetitif. Sebuah indikator ketidaksesuaian antara hasil sistem pendidikan tinggi dan kebutuhan ekonomi adalah masa tunggu yang panjang antara kelulusan dan mendapat pekerjaan.

Indonesia - Mengelola Pendidikan Tinggi untuk Relevansi dan Efisiensi *(Indonesia-Managing Higher Education for Relevance and Efficiency – I-MHERE)*

Proyek I-MHERE mengembangkan lingkungan yang mendorong universitas negeri agar lebih otonom dan akuntabel seiring dengan meningkatkan kualitas, relevansi, efisiensi dan keadilan dari pendidikan tinggi. I-MHERE mengembangkan kerangka hukum bagi pendidikan tinggi dan memfasilitasi reformasi sistem pendidikan tinggi dan pengawasan. Melalui bantuan proyek ini, pada hingga bulan September 2010, Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan penghargaan akreditasi berbasis lembaga kepada 33% lembaga pendidikan tinggi negeri. Pada saat yang bersamaan proyek ini telah memberikan 79 hibah untuk memperkuat manajemen dan administrasi universitas negeri dan swasta dalam bidang tata kelola, keuangan, penjangkauan, materi dan metode penyampaiannya *(content and delivery)*. Proyek ini juga mendanai pengembangan program untuk revitalisasi Universitas Terbuka dan memberikan dana untuk mendukung Asosiasi Jaringan Pembelajaran Jarak Jauh Global *(Global Distance Learning Network (GLDN) Association)*.

Riset dan Inovasi dalam Sains dan Teknologi *(Research and Innovation in Science and Technology - RISET)*

Proyek yang diusulkan ini akan bekerja sama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk menciptakan lingkungan yang mendorong penelitian dan pengembangan sains dan teknologi. Selain itu, proyek ini juga menguatkan sumber daya manusia dan insentif kinerja pada lembaga sains dan teknologi yang penting di Indonesia. RISET akan memperbaiki kerangka kebijakan inovasi nasional dan memperkuat penelitian publik melalui manajemen, kualitas dan relevansi. Proyek ini juga akan memberikan bantuan teknis untuk memperbaiki manajemen skema hibah kompetitif yang didanani Kementerian Riset dan Teknologi.

Indonesia: Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Studi ini menemukan bahwa hampir 4 juta mahasiswa terdaftar pada lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. dan ini mencerminkan angka partisipasi kasar sebesar 26,6%. Dari 1,2% PDB yang dikeluarkan untuk pendidikan tinggi, 0,9% berasal dari sumber swasta, sebagian besar dalam bentuk uang kuliah, biaya lain dan iuran. Sumbangan swasta adalah salah satu yang terbesar di dunia. Partisipasi oleh penduduk pedesaan dan kelompok yang kurang beruntung secara sosial ekonomi masih mengkhawatirkan di Indonesia. Kurang dari 2% kaum muda berusia 19-22 tahun dari keluarga tidak mampu terdaftar pada lembaga pendidikan tinggi dibandingkan dengan 60% kaum muda dari keluarga mampu. Lebih dari 80% belanja publik untuk pendidikan tinggi memberikan keuntungkan bagi 40% keluarga yang lebih mampu.

Di Indonesia, alokasi untuk anggaran publik bagi beasiswa masih kecil, khususnya dibandingkan dengan negara yang lebih maju. Beasiswa tidak menguntungkan masyarakat yang paling miskin karena mereka putus sekolah lebih awal.

Program yang Didukung Bank Dunia:

- IMHERE *(Indonesia-Managing Higher Education for Relevance and Efficiency)*

Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kesehatan

Tenaga kerja kesehatan di Indonesia telah meningkat dan rasio antara pekerja kesehatan dengan penduduk telah menjadi lebih baik. Menariknya, dokter tersebar dengan tidak merata secara geografis, sedangkan bidan justru tersebar secara merata. Mayoritas pekerja kesehatan bekerja sebagai pegawai negeri dan bekerja paruh-waktu dalam praktik pribadi.

Kapasitas untuk melatih pekerja kesehatan telah menjadi lebih baik secara kuantitas, tetapi kualitas masih memprihatinkan. Pendidikan keperawatan dan kebidanan perlu perhatian agar kesehatan ibu lebih baik. Bidan dan perawat meraih sertifikat kelulusan mereka dari sekolah dan bukan dari uji kompetensi terstandar mandiri. Ada bukti bahwa pekerja kesehatan memberikan layanan jasa dengan kualitas buruk.

Metodologi yang sekarang dipakai untuk merencanakan dan menganggarkan pekerja kesehatan dibuat berdasarkan norma dan standar nasional atau perhitungan beban kerja di fasilitas umum. Hampir separuh orang yang sakit dan mencari pengobatan melakukannya di fasilitas swasta atau dengan penyedia layanan swasta. Kabupaten/kota tidak mampu menyediakan layanan ini meskipun mereka diberikan otoritas legal untuk mengelola tenaga kerja kesehatan. Program pegawai negeri kontrak dan insentif yang ditawarkan untuk menarik dokter, perawat dan bidan ke daerah terpencil tidak memberikan hasil yang maksimal.

Ketika usia penduduk menua, tuntutan akan layanan kesehatan yang makin canggih akan muncul dari para lansia. Memiliki lebih banyak dokter dan bidan memang menambah penggunaan layanan kesehatan secara umum. Tetapi uang pemerintah dapat dibelanjakan dengan lebih efisien dengan fokus pada penempatan dokter dan bidan di daerah pedesaan. Variasi pada jumlah dan kualitas keterampilan pekerja kesehatan menjelaskan variasi hasil kesehatan di Indonesia.

Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan *(Health Professional Education Quality - HPEQ)*

HPEQ bertujuan memperbaiki kualits pendidikan tinggi dalam sektor kesehatan bagi profesi kedokteran dan kesehatan melalui akreditasi sekolah dan program sertifikasi profesi. HPEQ memusatkan perhatian pada: penguatan kebijakan dan prosedur untuk akreditasi sekolah; memperbaiki kualitas pendidikan melalui sertifikasi lulusan menggunakan ujian nasional berbasis kompetensi; dan memperbaiki kualitas sekolah melalui hibah berbasis hasil. Bantuan teknis HPEQ mencakup pendidikan kedokteran, perawatan gigi, perawat dan kebidanan. Tetapi bantuan dana hanya diberikan bagi sekolah kedokteran. Bantuan di masa depan akan berfokus pada pendidikan gizi, kesehatan masyarakat, dan farmasi.

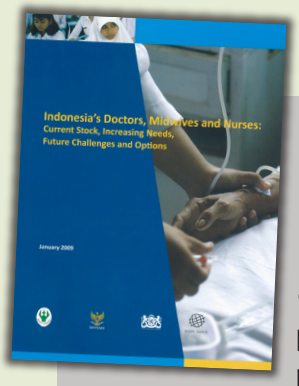

Dokter, Bidan dan Perawat Indonesia: Jumlah Sekarang, Kebutuhan yang Bertambah, Tantangan Masa Depan dan Pilihan-pilihan

Sebagai bagian Kajian Sektor Kesehatan komprehensif yang sedang dilaksanakan Pemerintah Indonesia, laporan ini mengumpulkan, menganalisis dan menerjemahkan informasi tentang penyedia layanan kesehatan, yaitu dokter, bidan dan perawat. Laporan ini menggambarkan jumlah dan distribusi pekerja kesehatan, menarik perhatian pada kelemahan dalam metode perencanaan tenaga kerja dan mengkaji kebijakan sumber daya manusia, termasuk struktur pemerintah dan kerangka perundang-undangan yang mengatur pekerja kesehatan. Laporan ini berisi rekomendasi untuk mengatasi tantangan pada tenaga kerja kesehatan di Indonesia.

Kajian Sektor Kesehatan

Ringkasan kebijakan kajian sektor kesehatan dikembangkan dengan latar belakang studi yang dilaksanakan untuk Inisiatif Penguatan Sistem Kesehatan. Biasanya difokuskan pada satu aspek sistem kesehatan dan termasuk di dalamnya latar belakang atau konteks, isu utama dari bidang yang dibahas dan rekomendasi atau opsi kebijakan. Saat ini, empat ringkasan telah disiapkan, yaitu: 1) kesehatan ibu, dengan fokus pada melahirkan bayi di fasilitas kesehatan; 2) pembiayaan kesehatan, dengan fokus pada ruang fiskal untuk kesehatan; 3) sistem informasi manajemen kesehatan, dengan fokus pada menyelaraskan sistem informasi asuransi kesehatan dan 4) farmasi, dengan fokus pada menyediakan opsi dan alasan pembenaran reformasi. Masih ada beberapa ringkasan kebijakan lain yang sedang disusun.

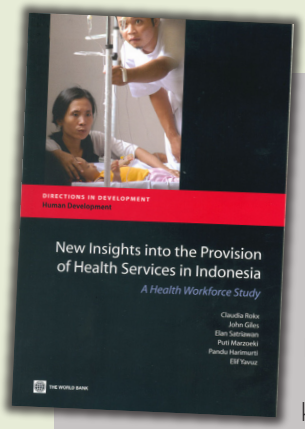

Pemahaman Baru dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Indonesia

Studi ini meneropong jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan serta praktisi kesehatan dan dampaknya pada penggunaan layanan kesehatan.

Selama masa studi, telah terdapat keuntungan penting dalam penentu hasil kesehatan (seperti bertambahnya jumlah pekerja kesehatan). Meski demikian, Indonesia terus mengalami tantangan berat dalam hal jumlah, distribusi dan kualitas pekerja kesehatannya. Sejak pertengahan 1990-an, ada peningkatan jumlah fasilitas layanan kesehatan masyarakat dan jumlah tenaga kerja, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan, serta peningkatan penting dalam hal anggaran kesehatan masyarakat sejak tahun 2004. Meski jumlah dan rasio dokter dengan penduduk meningkat di seluruh provinsi dan daerah pedesaan, praktik penempatan dan distribusi yang tidak merata tetap mengkhawatirkan.

Kualitas umum dari layanan yang diberikan fasilitas umum dan swasta, serta praktisi kesehatan yang praktik bebas sudah lebih baik di seluruh provinsi, terutama di bidang layanan prenatal, layanan kuratif anak, dan layanan orang dewasa. Meski demikian, peningkatan kualitas (diukur berdasarkan kemampuan untuk melakukan diagnosa dan mengobati) masih rendah dan kualitas secara umum tergolong rendah.

Program yang Didukung Bank Dunia:

- HPEQ *(Health Professional Education Quality Projects)*

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Penggunaan TIK yang efektif berpotensi mengatasi rintangan yang menghambat perbaikan pendidikan di Indonesia. Hingga sekarang, SchoolNet, program Kementerian Pendidikan Nasional, telah menghubungkan lebih dari 17.000 sekolah. Program lain telah membagikan hibah untuk pembelian peranti keras komputer dan pelatihan di sekolah. Menurut studi terbaru yang diminta oleh Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh Bank Dunia di bawah Program Dukungan Pendidikan Belanda, sebanyak 95% sekolah berada dalam jangkauan koneksi Internet dengan kecepatan rendah yang bisa mengunduh surat elektronik berukuran terbatas. Akan tetapi, saat ini siswa di sekolah di pedesaan dan daerah terpencil memiliki akses yang lebih terbatas pada komputer and koneksi Internet yang berfungsi. Dalam ibukota kabupaten/kota dan pusat perkotaan, akses pada komputer dan teknologi lain juga tersebar dengan tidak merata. Ada sekolah yang memiliki beberapa laboratorium komputer yang terkoneksi ke Internet, sedangkan siswa di sekolah yang dekat hanya mempunyai akses TIK terbatas atau bahkan tidak sama sekali.

Infrastruktur TIK yang merata akan memperkuat pengelolaan pendidikan serta mendukung pengelolaan sekolah dan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas sekolah. Meningkatnya komunikasi dan berbagi informasi akan membantu sekolah yang kurang berprestasi menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya kurikulum digital dan pendidikan jarak jauh juga akan membantu guru dengan kapasitas rendah. Kemampuan profesional dapat ditingkatkan dengan biaya rendah melalui TIK dan dapat digabungkan dengan sumber daya pembelajaran berkualitas tinggi untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah berprestasi buruk dan di pedesaan. Pendekatan terpadu nasional untuk menyelenggarakan koneksi Internet (termasuk pembelian dalam jumlah besar dan standardisasi peralatan), pengembangan kemampuan profesional guru dan pengembangan materi sedang direkomendasikan kepada pemerintah.

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Papua

Pemerintah Provinsi Papua meminta Bank Dunia membantu mengubah pendidikan di Papua melalui peningkatan penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK). Melalui Program Dukungan Pendidikan Belanda, tim Bank Dunia membantu mengembangkan strategi pendidikan TIK dan rencana implementasi. Melalui strategi tersebut, pemerintah provinsi ingin memfasilitasi pengelolaan pendidikan dan keuangan yang lebih baik di tingkat sekolah, kabupaten, dan provinsi. Strategi tersebut juga diharapkan akan mengembangkan kapasitas staf teknis, guru, pemimpin sekolah dan pejabat pendidikan yang berkaitan dengan TIK dalam kompetensi pendidikan; meningkatkan hubungan antara sekolah, kabupaten dan provinsi, serta dunia di sekitar mereka; serta memperbaiki keterampilan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas dan prospek bekerja para siswa. Strategi TIK Papua memiliki empat bidang fokus:

1. Memperbaiki Infrastruktur TIK: Konektivitas dan Peralatan;
2. Memperbaiki Sistem Pemantauan dan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan
3. Meningkatkan Kapasitas Staf Pendidikan
4. Mengembangkan dan Menyebarkan Sumber Daya Pembelajaran

Program TIK Papua akan diujicobakan di salah satu kabupaten/kota di Papua dengan bantuan teknis dari Bank Dunia di bawah Program Dukungan Pendidikan Belanda. Program ini dikembangkan dari beberapa inisiatif yang sedang berjalan dan telah direncanakan tentang pendidikan TIK di Papua, antara lain: usulan pengembangan balai TIK di sekolah Papua yang didanai dengan hibah dari Kemdiknas dan inisiatif pendukung dari pemerintah provinsi, jaringan pendidikan nasional (Jardiknas), program untuk memperbaiki pendidikan/pengelolaan dana di tingkat nasional, serta pengembangan materi pembelajaran atau muatan digital dalam jaringan *(online)* dan di luar jaringan *(offline)*.

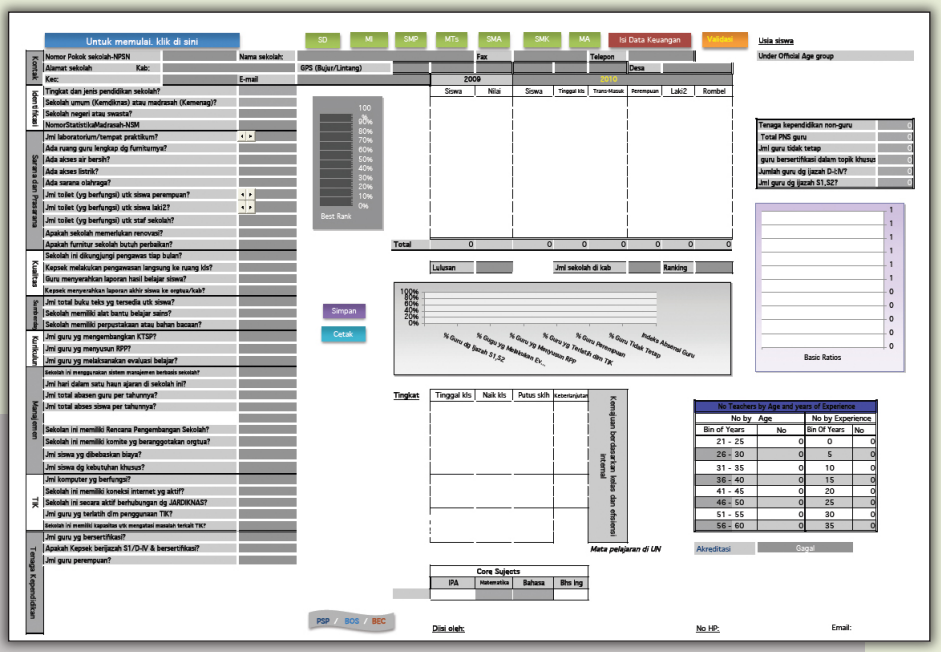

TRIMS: Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah *(Tool for Reporting and Information Management by Schools)*

TRIMS mudah diaplikasikan, berbasis aplikasi komputer Excel yang dapat digunakan guru dan administrator sekolah untuk memasukkan dan menganalisis data sekolah mereka untuk tujuan perencanaan, penganggaran dan pemantauan, serta untuk membuat keputusan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Data dimasukkan ke TRIMS dua kali setahun pada tiap semester.

TRIMS mengumpulkan semua data yang harus disediakan sekolah bagi pemerintah pada semua tingkat dan memungkinkan pengguna dapat mengubah data tersebut menjadi informasi yang berguna seperti diagram kue, grafik, rasio dan persentase hanya dengan sekali tekan tombol. Sekolah dapat menggunakan informasi ini untuk pemantauan, perencanaan dan penyusunan anggaran serta menyerahkannya ke kabupaten/kota, provinsi dan pusat untuk dirangkum. TRIMS diujicobakan di sekolah di enam kabupaten/kota terpilih sebelum disebarkan ke seluruh Indonesia melalui program pelatihan BOS untuk 250.000 sekolah mulai tahun 2011.

TRIMS dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain:

- Identifikasi sumber daya yang dimiliki sekolah dan yang tidak dimiliki
- Menetapkan patokan standar yang sesuai dengan standar layanan minimum
- Pemantauan kemajuan sekolah
- Menyampaikan informasi yang relevan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan manajemen BOS
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
- Menyusun profil sekolah yang selalu dapat diperbarui
- Menguji berbagai skenario (misalnya, "apa yang akan terjadi pada jumlah guru yang dibutuhkan dan jumlah siswa per kelas jika jumlah siswa meningkat 5%?")

Rincian Proyek

Nama Proyek	Sub-Sektor	TTL	Kode Proyek	Instrumen Peminjaman	Biaya Total Proyek	Pinjaman IBRD	
BOS-KITA *(School Operational Assistance - Knowledge Improvement through Transparency and Accountability)*	Pendidikan Dasar	Ratna Kesuma	P107661	Pinjaman Investasi Khusus *(Specific Investment Loan)*	US $ 2,621.5 juta	US $600 juta	
BOS-KITA Pendanaan Tambahan	Pendidikan Dasar	Ratna Kesuma	P119125	Pinjaman Investasi Khusus *(Specific Investment Loan)*	US $ 3,802.7 juta	US$ 500 juta	
BERMUTU *(Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading)*	Pengembangan Guru	Susiana Iskandar	P097104	Pinjaman Investasi Khusus *(Specific Investment Loan)*	US $ 195.1 juta	US $ 24.5 juta	
ECED *(Early Childhood Education and Development)*	Pendidikan Pre-sekolah	Rosfita Roesli	P089479	Pinjaman Investasi Khusus	US $ 127.7 juta	-	
IMHERE *(Indonesia-Managing Higher Education for Relevance and Efficiency)*	Pendidikan Tinggi	Ratna Kesuma	P085374	Pinjaman Investasi Khusus *(Specific Investment Loan)*	US $ 114.54 juta	US $ 50 juta	
WSSLIC 2 *(Water Supply and Sanitation for Low Income Communities)*	Pembangunan Digerakkan Masyarakat	Claudia Rokx	P059477	Pinjaman Investasi Khusus *(Specific Investment Loan)*	US$ 100.7 juta	-	
HPEQ *(Health Professional Education Quality)*	Pendidikan Tinggi	Pandu Harimurti	P113341	Pinjaman Investasi Khusus	US$ 83.87 juta	US$77.8 juta	

Nama	Nomor Dana Perwalian	TTL	Lembaga Pembangunan	Jumlah Hibah	
BEC-TF *(Basic Education Capacity Trust Fund)*	TF 070811	Mae Chu Chang	Uni Eropa + Pemerintah Kerajaan Belanda	39 juta Euro	
DESP *(Dutch Education Support Program)*	TF 070597	Mae Chu Chang	Pemerintah Kerajaan Belanda	US$ 31.1 juta	

	Kredit IDA	Pemerintah Indonesia	Pembiayaan Bersama	Kerangka Waktu	Tujuan Program
	-	US $2,021.5 juta	US $20 juta	11/11/08 - 12/31/10	Memperbaiki akses pada pendidikan berkualitas bagi semua anak usia 7-15 tahun dengan memperkuat manajemen berbasis sekolah dan peran serta masyarakat, memperbaiki peraturan pengelolaan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dari program BOS dan penggunaan dana BOS yang lebih baik.
	-	US $ 3,302.7 juta	-	7/7/10 - 12/31/12	Memperkuat pengelolaan keuangan BOS dan praktik tata kelola. Selain itu, kegiatan baru dilaksanakan untuk memberikan dukungan langsung untukmanajemen berbasis sekolah serta meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan pengelolaan program BOS.
	US $ 61.5 juta	US $ 57.1 juta	US $ 52 juta	2/5/08 - 12/31/13	Berkontribusi pada perbaikan kualitas secara menyeluruh dan kinerja guru dengan meningkatkan pengetahuan guru tentang mata pelajaran yang diasuhnya dan keterampilan pedagogi di kelas.
	US $ 67.5 juta	US $ 35 juta	US $ 25.3 juta	12/11/06 - 12/31/13	Memperbaiki pengembangan anak miskin secara umum dan kesiapan mereka untuk meneruskan ke pendidikan lebih lanjut melalui sistem PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang berkelanjutan dan berkualitas.
	US $ 30 juta	US $ 34.54 juta	-	12/20/05 - 12/31/12	Untuk menciptakan lingkungan yang mendorong evolusi lembaga pendidikan tinggi negeri yang otonom dan akuntabel dan mengembangkan mekanisme dukungan efektif untuk peningkatan kualitas, relevansi, efisiensi dan keadilan pendidkan tinggi.
	US$77.4 juta	US$ 12.2 juta	US$ 3.9 juta (AusAID)	06/15/2000 to 12/31/2010	Untuk memperbaiki perilaku kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat yang terkait penyakit yang menular lewat air dan memberikan pasokan air yang aman, layak, murah dan tersedia di mana-mana, serta layanan sanitasi.
	-	US$ 6 juta	-	01/01/2010 - 31/12/2014	Untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi dalam sektor kesehatan bagi profesi medis dan kesehatan melalui akreditasi sekolah dan program sertifikasi profesi.

	Komponen	Periode	Tujuan utama
	1. Memperkuat kapasitas dalam dialog kebijakan pendidikan yang dipimpin Pemerintah Indonesia 2. Tata kelola pemerintah yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya yang efisien 3. Manajemen informasi yang lebih baik	06/06/2007 - 06/30/2012	Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Indonesia untuk meraih sasaran Pembangunan Milenium dan Pendidikan untuk Semua melalui tata kelola yang baik dalam sektor pendidikan.
	1. Pengelolaan pengajaran dan kualitas pendidikan 2. Memperbaiki akuntabilitas dan struktur pendukung pendidikan dasar 3. Pemantauan dan evaluasi pendidikan 4. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pendidikan 5. Tanggapan Cepat (Rapid Response) 6. Pemantauan, evaluasi dan menangani keluhan program BOS 7. Pemasaran sosial untuk BOS 8. Studi manajemen berbasis sekolah	09/21/2006 - 06/30/2015	Melaksanakan analisis teknis penting menggunakan pengetahuan global dan praktik internasional terbaik untuk membantu pemerintah meraih tujuannya dalam rencana jangka menengah dan panjang (RENSTRA) dan melaksanakan dengan baik kebijakan dalam Undang-undang Guru dan Dosen yang baru.

Fakta Penting Pendidikan

INDONESIA (2009)

	Laki-laki	Perempuan	Total
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (2009) %	94.48	94.23	94.36
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah (2009) %	56.81	56.56	56.69
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (2009) %	66.75	68.09	67.40
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (2009) %	45.95%	44.17	45.09
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (2009) %	21.65%	22.25	21.95
Partisipasi Sekolah Dasar Swasta (2009) %			16.79
Partisipasi Sekolah Menengah Swasta (2009) %			37
Rasio Siswa-Guru Sekolah Dasar (2009)			1/23.3
Rasio Siswa-Guru Sekolah Menengah Pertama (2009)			1/20.1
Indeks Paritas Gender Sekolah Dasar (2009)			1.00
Index Paritas Gender Sekolah Menengah (2009) %			99
Usia Anak Putus Sekolah/Tidak Sekolah Dasar (2009)	334,234	235,828	570,062
Kemampuan Baca Tulis Dewasa (Usia 15-65) (2009) %	95.59	89.61	92.56
Pengangguran Terbuka (2009) %	7.7	8.1	8.14

Jumlah Total Siswa (2009):	48.9 juta
Jumlah Total Guru (2008):	2.68 juta
Jumlah Total Sekolah (2010):	326,328 (15.24% atau 50.393 dari total jumlah sekolah di bawah Kementerian Agama – Kemenag)
Pengeluaran Pendidikan dari Pemerintah (2009):	1.20% dari PDB, atau 19,27% dari pengeluaran pemerintah
Belanja Pendidikan untuk Sekolah Dasar: (% dari total anggaran tahunan Kemdiknas – 2009)	33.05%
Belanja Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (2009): (% dari total anggaran tahunan Kemdiknas - 2009)	6.38%
Rata-rata Gaji Guru, Sekolah Dasar:	$2,012 per Tahun

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009;
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 2008;
Nomor Pokok Sekolah Nasional- Jaringan Pendidikan Nasional

	THAILAND (2008)	MALAYSIA (2007)	CAMBODIA (2007)	FILIPINA (2007)
	Total	Total	Total	Total
	89	96	90	90
	72	68	34	60
	88	93	56	85
	61	49	23	71
	45	32	5	29
	18	1%	1	8
	18	4	2	20
	16	15	51	34
	20	17	31	39
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	650,919	125,312	211,896	1,115,377
	94	92	76	93
	1	3	Tidak ada data	6
	12,723,430	6,407,880	3,447,104	23,574,248
	616,290	384,264	82,630	676,426
	5%	5%	2%	3%
	37%	33%	Tidak ada data	54%
	33%	26%	Tidak ada data	27%

Fakta Kunci Kesehatan

INDONESIA

	1991	1997	2002	2007
Angka Harapan Hidup saat Kelahiran, total (tahun)	62		67.9	69
Angka Kesuburan, total (kelahiran tiap perempuan)	3.0	2.8	2.6	2.6 – 2.3**
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	67.8	45.7	34.7	34
Rasio Kematian di Bawah 5 Tahun (tiap 100.000 kelahiran hidup)	97.4	58.2	45.7	45
Rasio Kematian Ibu (tiap 100.000 kelahiran hidup)*	465	425	307	228
Kelahiran Didampingi Staf Kesehatan Terampil (% dari total)	35.1	49.1	66.2	
Kelahiran Terjadi di Fasilitas Kesehatan (% dari total)	20.9	20.7	39.8	73
Imunisasi – semua (% dari total)	48.3	54.8	51.4	46.1
Kurang Gizi Berat Badan Rendah di Bawah 5 Tahun (% dari total)	37	29	27	58.6

Sumber: WDI 2007 a) DHS 2002/3 – 2007 BPS, BKKBN, Kemkes, Measure DHS Indonesia Demographic and Health Survey, Preliminary Report 2007, b) SUSENAS 2006.

* Semua rasio kematian ibu berdasarkan interval dengan kepercayaan sangat tinggi (very high confidence intervals), seringkali perbedaan angka tertinggi dan terendah lebih besar daripada nilai tengah (mid-point).

** 2.6 adalah perkiraan DHS 2007; 2,3 dengan contoh yang lebih baik (refined sampling) (Terence Hull, 2008).

	Indonesia	Malaysia	Filipina	Thailand	Vietnam	Sri Lanka	Asia Timur dan Pasifik (semua tingkat pendapatan)	Pendapatan rendah & menengah
Harapan Hidup saat Kelahiran, total (tahun)	72.8	76.8	74.1	72.1	76.4	78.0	75.2	68.8
Angka Kesuburan, total (kelahiran tiap perempuan)	2.2	2.6	3.1	1.8	2.1	2.3	1.9	2.7
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	29.8	5.7	26.2	12.0	19.5	12.7	20.4	46.9
Rasio Kematian di Bawah 5 tahun (tiap 100.000 kelahiran hidup)	38.9	6.1	33.1	13.5	23.6	14.7	24.8	66.5
Rasio Kematian Ibu (tiap 100.000 kelahiran hidup)*	240	31	94	48	56	39	84	290
Kelahiran Didampingi Staf Kesehatan Terampil (% dari total)	79.4	-	61.8	97.3	-	98.5	89.9	63.2
Imunisasi – semua (% dari total)	83.0	95.0	92.0	98.0	92.0	98.0	91.6	81.5
Kurang Gizi Berat Badan Rendah di Bawah 5 Tahun (% dari total)	19.6	-	26.2	-	-	-	11.9	23.5

Sumber: World Development Indicators 2009

Jangkauan Geografis

WSSLIC 2 (Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah)

WSSLIC 2 bertujuan memperbaiki perilaku sehat dan layanan kesehatan masyarakat terkait penyakit yang ditularkan melalui air, serta menyediakan pasokan air yang mudah dijangkau dan layanan sanitasi di delapan provinsi:

- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Kepulauan Bangka Belitung
- Jawa Barat
- Jawa Timur
- Nusa Tenggara Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Barat

BOS-KITA (Bantuan Operasional Sekolah - Perbaikan Pengetahuan untuk Transparansi dan Akuntabilitas)

BOS-KITA mendukung sekolah negeri dan swasta Kementrian Pendidikan Nasional di seluruh Indonesia (sekitar 250.000 sekolah).

BERMUTU (Pendidikan yang Lebih Baik melalui Manajemen Reformasi dan Peningkatan Kualitas Akademik Guru yang Universal)

BERMUTU bekerja dengan guru, kepala sekolah dan pengawas di 75 kabupaten/kota dan 16 provinsi:

- Nanggroe Aceh Darussalam
- Sumatera Barat
- Jambi
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Gorontalo
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Kalimantan Tengah
- Maluku
- Papua
- Papua Barat
- Maluku Utara

HPEQ (Proyek Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan)

HPEQ bekerja pada tingkat nasional untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi dalam sektor kesehatan untuk profesi medis dan kesehatan melalui akreditasi sekolah dan program sertifikasi profesi.

IMHERE (Indonesia-Mengelola Pendidikan Tinggi demi Relevansi dan Efisiensi)

IMHERE bekerja dengan 59 universitas negeri dan 3 universitas swasta di 26 provinsi:

- Nanggroe Aceh Darussalam
- Sumatera Utara
- Riau
- Kepulauan Riau
- Sumatera Barat
- Jambi
- Bengkulu
- Sumatera Selatan
- Lampung
- Jawa Barat
- DKI Jakarta
- Banten
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Bali
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Selatan
- Gorontalo
- Maluku Utara
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat
- Papua

ECED (Pendidikan Anak Usia Dini)

ECED menyasar 738.000 anak (usia 0-6), yang tinggal di sekitar 6.000 komunitas miskin yang terletak di 3.000 desa dalam 50 kabupaten/kota di 24 provinsi:

- Nanggroe Aceh Darussalam
- Sumatera Barat
- Jambi
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Gorontalo
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Barat
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua
- Papua Barat
- Sumatera Utara
- Bengkulu
- Sumatera Selatan
- DI Yogyakarta
- Lampung

DESP (Program Dukungan Pendidikan Belanda)

DESP bekerja pada tingkat nasional dan memberikan dukungan analisis kepada pemerintah dan program BOS-KITA di seluruh Indonesia.

BEC-TF (Dana Abadi Kapasitas Pendidikan Dasar)

BEC-TF bekerja dengan 50 pemerintah daerah di 9 provinsi:

- Nanggroe Aceh Darussalam
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Kalimantan Tengah
- Sulawesi Barat
- Maluku Utara
- Papua
- Papua Barat

For more information, please contact:

Mae Chu Chang, Human Development Coordinator and Lead Educator
mchang@worldbank.org

Claudia Rokx, Lead Health Specialist
crokx@worldbank.org

Sheila Town, Communications and Operations Officer
stown@worldbank.org

Human Development Sector

World Bank Office Jakarta
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 12th Floor
Jl Sudirman Kav 52-53, Jakarta, 12190

Phone (021) 5299-3000 Fax (021) 539-3111

www.worldbank.org

www.worldbank.org/id/education

www.worldbank.org/id/health